



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JUSUF SATRIO WIBOWO**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM**
3. NHK : **639400**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.370.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/98 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 907.000.000
3. Tanah Seluas 1260 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **236.200.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **64.800.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **105.344.659****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.776.344.659****III. HUTANG** Rp. **208.165.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.568.179.659**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.